



PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH DATAR



RENCANA KERJA 2027

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak akan berarti banyak tanpa adanya implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Diharapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar kedepan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH DATAR



RONAL SATRIA, S.IP
NIP. 198802142007011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.....	 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 & Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	39
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat.....	62
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.....	 63
3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2027.....	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027.....	63
3.3 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027.....	65
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2027.....	 69
 BAB V PENUTUP.....	 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026	8
Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar	32
Tabel 2.3 (T-C.31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tanah Datar Tahun 2027 Kabupaten Tanah Datar	41
Tabel 2.4 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar	62
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027	64
Tabel 3.2 Persandingan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027	64
Tabel 3.3 Target Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027	66
Tabel 4.1 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar	70

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah kabupaten/kota harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pasal 139, Perangkat Daerah harus menyampaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) paling lambat minggu setelah RKPD ditetapkan kepada BappedaLitbang. Penyusunan Renja SKPD harus mempedomani Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD). RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan operasional tahunan yang disusun oleh perangkat daerah untuk menjabarkan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dalam pembangunan daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah guna mencapai target kinerja tahunan. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Mempedomani pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 diwajibkan kepada Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Rencana Kegiatan Perangkat Daerah. Sedangkan Rencana Kegiatan Perangkat Daerah dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Dalam penyusunan Renja perangkat daerah ada beberapa tahapan yang dilaksanakan yaitu:

1. Persiapan Penyusunan
Penyusunan Renja didahului dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Daerah, tahapan penyusunan perangkat daerah menyiapkan:
 - a. Pembentukan tim penyusunan Renja
 - b. Penyusunan agenda kerja
 - c. Pengumpulan data dukung
2. Penyusunan Rancangan Awal
 - a. Evaluasi Kinerja: Menilai hasil Renja tahun sebelumnya, menganalisis capaian, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang.
 - b. Penyusunan Tujuan & Sasaran: Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra PD ke dalam target satu tahun.
 - c. Identifikasi Program/Kegiatan: Menyusun rancangan program dan kegiatan baru untuk optimalisasi kinerja, selaras dengan prioritas RKPD.
3. Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah yang bertujuan untuk Diskusi untuk sinkronisasi, sinergi, serta mendapatkan masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan
4. Penyusunan Rancangan Akhir dengan mempedomani hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang.
5. Penetapan Renja perangkat daerah melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Tanah Datar dapat terlaksana sesuai dengan target pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53).
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 61).
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

1.3 KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan Renja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum tujuan disusunnya Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 adalah merumuskan dan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas kepegawaian sebagai upaya mewujudkan kepegawaian daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

Secara spesifik tujuan penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar antara lain:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar belakang
	1.2 Landasan hukum
	1.3 Ketentuan Umum
	1.4 Maksud dan tujuan
	1.5 Sistematika penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2027 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai tahun 2025 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026
Kabupaten Tanah Datar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
					100%	101,04%	101,04	100%		
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%							
5	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Outcome: Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%							
10										
00										
10										
00										
5										

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat at realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
					3 dokumen	3 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	18,18
5		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Out Put : Jumlah laporan dokumen perencanaan perangkat daerah	11 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	2 dokumen	2 dokumen	18,18
5		Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Out Put : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	15 dokumen	3 dokumen	4 dokumen	133,33	3 dokumen	3 dokumen	20,00
5		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja realisasi kinerja SKPD	Output: Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	115 laporan	23 laporan	23 laporan	100,00	18 laporan	18 laporan	15,65

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat at realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03 01 2 02 01	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Outcome: Persentase penyelesaian administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	100%					
					Output: Jumlah yang menerima gaji dan tunjangan ASN	168 orang		25 orang	25 orang	14,88
					Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 laporan		2 laporan	2 laporan	20,00
					Outcome: Persentase peningkatan kapasitas ASN	100%				

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03	01	2	06	09	-	-	-	-	-
5	03	01	2	06	06	-	-	-	-	-
5	03	01	2	06	01	3 paket	3 paket	100,00	2 paket	2 paket
5	03	01	2	06	01	5 paket	4 paket	80,00	5 paket	5 paket
5	03	01	2	06	04	50 paket	20 paket	100%	20 paket	10,00
5	03	01	2	06	04	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Output: Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output: Jumlah paket bahan logistik yang disediakan

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03	01	2	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8 paket	87,50	4 paket	4 paket	8,00
						902 dokumen	100,00	-	-	0,00
						12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	20,00
						30 laporan	103,34	30 laporan	30 laporan	41,66
						72 laporan				
5	03	01	2	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
5	03	01	2	06	Fasilitasi kunjungan tamu	60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
5	03	01	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				
						60 laporan				

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5										
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	Pengadaan Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan	Output: Jumlah Kendaraan perorangan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	11 unit					-	-	0,00
5	Pengadaan Mebel	Output: Jumlah pengadaan mebel yang disediakan	19 unit					-	-	0,00
5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	36 unit		1 unit	1 unit	100,00	-	-	0,00

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)					
5	03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%								
5	03	01	2	08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	1 laporan	20,00		
5	03	01	2	08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	20,00		
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	20 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	12 laporan	60,00		

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat at realis asi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
					10 unit	10 unit	100,00	10 unit	10 unit	18,51
					54 unit				-	0,00
					Output: Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak, KIR serta pemeliharannya					
					Pemeliharaan Mebel					
5	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Output: Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak, KIR serta pemeliharannya	54 unit		10 unit	10 unit	100,00	10 unit	10 unit	18,51
5	Pemeliharaan Mebel	Output: Jumlah mebel yang dilakukan pemeliharaan /Jumlah mebel yang dipelihara	5 unit						-	0,00

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03	01	02	03	06	09	2	01	03	05
5	03	01	02	03	06	09	2	01	03	05
5	03	01	02	03	06	09	2	01	03	05
5	03	01	02	03	06	09	2	01	03	05
5	03	01	02	03	06	09	2	01	03	05
5	03	01	02	03	06	09	2	01	03	05

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03	02	01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Output: Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5 dokumen		1 dokumen	100,00
5	03	02	01	02	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	5 dokumen		3 dokumen	100,00
5	03	02	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Output: Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian	1503 dokumen		350 dokumen	105,71

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03	02	2	01	08	5 lembaga	100,00	1 lembaga	1 lembaga	20,00
5	03	02	2	01	10	5 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	20,00
5	03	02	2	01	11	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	20,00
5	02	03	02	02	02	94,5				

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Peringkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Peringkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2025	Tingkat at realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	03	02	02	03	95 orang	125 orang	131,58	135 orang	135 orang	8,83
5	02	03	02	03	1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	7,69
5	03	02	02	03	40 orang	56 orang	140,00	50 orang	50 orang	15,15
1	03	02	02	03	99,5%	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik				

Kode Rekening	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2030	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun n-3	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2025			Target program/ kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2026	Perkiraan Realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat realisasi (%)		Realisasi	Tingkat realisasi (%)
5	Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00	1 dokumen	1 dokumen	20,00
5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Output: Jumlah PNS yang diberikan tanda jasa	1.928 orang		120 orang	106 orang	88,34	100 orang	100 orang	5,18
5	Pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	25 laporan		5 laporan	9 laporan	180,00	6 laporan	6 laporan	24,00
5	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Output: Jumlah Dokumen Proses izin Perceraian Pegawai yang dilayani	80 dokumen			14 dokumen		20 dokumen	20 dokumen	25,00

Renja Tahun 2027 merupakan tahun kedua dari penjabaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Untuk penyusunan Renja Tahun 2027 memperhatikan perkiraan capaian kinerja tahun 2026 dengan mempedomani target yang ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026. Hal ini bertujuan agar capaian kinerja pada akhir Renstra dapat tercapai.

Sebagai dasar untuk proyeksi capaian kinerja tahun 2026, Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sepanjang tahun 2025 sebagian besar sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp4.035.579.974 (empat milyar tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.826.038.310 (tiga milyar delapan ratus dua puluh enam juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) atau 94,81% dan capaian fisik sebesar 101,04%.

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp3.875.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.365.600,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau 86,85% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar 3.990.400,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) atau 88,86% dan capaian fisik sebesar 133,33%.

Pada tahun 2025 capaian kinerja keuangan kegiatan ini belum maksimal, karena penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan untuk capaian fisik telah melebihi target yang ditetapkan, karena pada akhir tahun 2025 dilaksanakan pergeseran setelah perubahan anggaran.

3. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dengan anggaran sebesar Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) atau 99,71% dan capaian fisik sebesar 100%.

4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp3.593.873.011,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sebelas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp3.424.757.313,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau 95,29% dan capaian fisik sebesar 100%.

5. Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.998.700,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau 99,94% dan capaian fisik sebesar 100%.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.970.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 98,50% dan capaian fisik sebesar 100%.

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp16.388.663,00 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp16.216.290,00 (enam belas juta dua ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 98,95% dan capaian fisik sebesar 80%.

Capaian fisik kegiatan ini tidak mencapai 100% karena jumlah paket pelaksanaan kegiatan digabungkan dari 5 paket menjadi 6 paket, hal ini disebabkan untuk percepatan untuk pemenuhan kebutuhan.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp6.546.400,00 (enam juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp6.522.850,00 (enam juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atau 99,64% dan capaian fisik sebesar 87,50%.

9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 93,33% dan capaian fisik sebesar 100%.

Pada tahun anggaran 2026 Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan tidak dialokasikan lagi, karena penyediaan bacaan berupa surat kabar kurang efektif. Hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan media online.

10. Fasilitas Kunjungan Tamu

Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.112.000,00 (empat juta seratus dua belas ribu seratus rupiah) atau 91,38% dan capaian fisik sebesar 100%.

11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp59.491.354,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) atau 99,15% dan capaian fisik delapan sebesar 103,34%.

12. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau 100,00% dan capaian fisik sebesar 100%.

13. Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp28.364.400,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp27.471.430,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah) atau 96,85% dan capaian fisik sebesar 100%.

14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp72.196.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp53.151.892,00 (lima puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) atau 73,62% dan capaian fisik sebesar 100%.

Realisasi keuangan kegiatan ini direalisasikan sesuai dengan tagihan. Rendahnya realiasi sub kegiatan ini selaras dengan pelaksanaan efisiensi pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp29.446.200,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) atau 99,82% dan capaian fisik sebesar 100%.

16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp155.500.500,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp138.507.881,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus

delapan puluh satu rupiah) atau 89,07% dan capaian fisik sebesar 100%.

17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp9.313.000,00 (sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) atau 93,13% dan capaian fisik sebesar 100%.

18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp31.661.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp31.472.400,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah) atau 99,40% dan capaian fisik sebesar 100%.

b. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.112.904.600 (satu milyar seratus dua belas juta sembilan ratus empat ribu enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.042.324.649 (satu milyar empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau 99,40% dan capaian fisik sebesar 111,72%.

1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN

Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan anggaran sebesar Rp8.960.500,00 (delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp8.778.500,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 97,97% dan capaian fisik sebesar 100%.

2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK

Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK dengan anggaran sebesar Rp95.593.500,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp95.166.555,00 (sembilan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau 99,55% dan capaian fisik sebesar 100%.

3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian

Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dengan anggaran sebesar Rp4.444.000,00 (empat juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.002.000,00 (empat juta dua ribu rupiah) atau 90,05% dan capaian fisik sebesar 105,71%.

4. Fasilitasi lembaga profesi ASN

Fasilitasi lembaga profesi ASN dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp48.094.700,00 (empat puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) atau 96,19% dan capaian fisik sebesar 100%.

5. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian

Pengelolaan sistem informasi kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp13.404.000,00 (tiga belas juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp12.566.250,00 (dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 93,75% dan capaian fisik sebesar 100%.

6. Pengelolaan mutasi ASN

Pengelolaan mutasi ASN dengan anggaran sebesar Rp28.139.000,00 (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp26.627.500,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 94,63% dan capaian fisik sebesar 104,75%.

7. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN

Pengelolaan kenaikan pangkat ASN dengan anggaran sebesar Rp22.556.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp20.205.150,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau 89,58% dan capaian fisik sebesar 100,58%.

8. Pengelolaan promosi ASN

Pengelolaan promosi ASN dengan anggaran sebesar Rp286.204.500,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp255.974.019,00 (dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan belas rupiah) atau 89,44% dan capaian fisik sebesar 92%.

Belum maksimalnya persentase capaian kinerja dan fisik disebabkan oleh pelaksanaan uji kompetensi untuk mutasi jabatan pimpinan tinggi tidak terlaksana. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan setelah pelantikan pejabat pimpinan tinggi yang mengikuti Seleksi Terbuka. Namun karena pada bulan Desember Kabupaten Tanah Datar dalam masa tanggap darurat bencana banjir bandang, pelaksanaan pelantikan tertunda. Sehingga pelaksanaan uji kompetensi untuk mutasi jabatan pimpinan tinggi tidak terlaksana.

9. Peningkatan kapasitas kinerja ASN

Peningkatan kapasitas kinerja ASN dengan anggaran sebesar Rp307.781.800,00 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp305.632.800,00 (tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) atau 99,30% dan capaian fisik sebesar 131,58%.

Capaian kinerja kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan, karena untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia, dilaksanakan Pelatihan *Public speaking* terhadap pegawai yang memberikan layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

10. Pengelolaan assesment center

Pengelolaan assesment center dengan anggaran sebesar Rp119.550.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp109.169.510,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 91,32% dan capaian fisik sebesar 100%.

Pada tahun 2025 dilaksanakan penilaian kompetensi dan potensi bagi PNS Kabupaten Tanah Datar, melalui pelaksanaan profiling ASN oleh BKN dan CACT BKN. Hasil uji kompetensi dan potensi ASN menjadi salah satu indikator penilaian talenta bagi ASN yang bertujuan untuk pengembangan karier.

11. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN

Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN dengan anggaran sebesar Rp128.455.865,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp111.660.400,00 (seratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) atau 86,93% dan capaian fisik sebesar 140%.

12. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur dengan anggaran sebesar Rp7.903.400,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp7.216.700,00 (tujuh juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) atau 91,31% dan capaian fisik sebesar 100%.

13. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai dengan anggaran sebesar Rp21.819.635,00 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp20.105.615,00 (dua puluh juta seratus lima tiga enam ratus lima belas rupiah) atau 92,14% dan capaian fisik sebesar 88,34%.

14. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN dengan anggaran sebesar Rp18.902.400,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp17.124.950,00 (tujuh belas juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 94,65% dan capaian fisik sebesar 180%.

Pada tahun 2025 terjadi peningkatan pelanggaran disiplin ASN dari 5 (lima) kasus pada tahun 2024 menjadi 9 (sembilan) kasus pada tahun 2025. Hal ini menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi serta penegakan disiplin pegawai kedepannya.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan, penempatan

- pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan, informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun serta pengembangan sumber daya manusia;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2030, berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Krnstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Sistem Merit	-		Baik	Baik	Baik	Baik	-	-	Baik	Baik	Belum dilakukan Penilaian Merit Sistem Oleh BKN
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen ASN	-		97,00	97,10	97,20	97,30	96,69	97,38	97,10	97,20	-
3	Nilai SAKIP	-		76,6	76,7	76,8	76,9	76,50	77,35	76,7	76,8	-
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	80	80	80	80	-	-	80	80	IKK pada Renstra 2025-2030
4			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	95,00	95,50	96,00	96,50	-	-	95,50	96,00	IKK pada Renstra 2025-2030
5			Persentase Pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya	92,00	92,50	93,00	93,50	-	-	92,50	93,00	IKK pada Renstra 2025-2030
6			Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	99	99,10	99,20	99,30	-	-	99,10	99,20	IKK pada Renstra

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Menengah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,6	80,7	80,8	80,9	80,53	79,27	80,7	80,8	2025-2030
8			Rasio Pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26,7	26,8	26,9	27	26,66	27,46	26,8	26,9	
9			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	39,95	40	40,05	40,1	39,91	55,31	40	40,05	

Dari tabel 2.2 (T.C-30), kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu pada indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen ASN dengan target kinerja sebesar 97 dan realisasi sebesar 97,38 dengan capaian kinerja sebesar 100,40%.
Capaian indikator ini menunjukkan masyarakat telah puas terhadap layanan kepegawaian yang diberikan oleh BKPSDM. Untuk terus meningkatkan capaian kinerja indikator ini, upaya yang dilakukan oleh BKPSDM adalah:
 - a. Memaksimalkan pelayanan secara online yang bertujuan memberikan kemudahan bagi penerima layanan dalam memperoleh pelayanan.
 - b. Meningkatkan sosialisasi terhadap jenis layanan melalui media sosial BKPSDM
 - c. Meningkatkan kenyamanan sarana dan prasarana layanan.
2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan target kinerja sebesar 76,6 dan realisasi sebesar 77,35 dengan capaian kinerja sebesar 100,98%.
Capaian indikator menunjukkan bahwa sasaran strategis BKSDM telah terwujud secara objektif. Selain itu kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal yang sistematis.

Sedangkan untuk indikator Indeks Sistem Merit, belum dilakukan penilaian oleh Badan Kepegawaian Negara. Hal ini disebabkan adanya peralihan pelaksanaan penilaian Indeks sistem merit dari Komisi Aparatur Sipil Negara ke Badan Kepegawaian Negara. Pelaksanaan penilaian direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dalam hal mengembangkan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis dan koordinator untuk urusan kepegawaian dan sumber daya manusia aparatur di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan

informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia Aparatur.

Dalam menetapkan tujuan organisasi dan program kerja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia harus memperhatikan isu-isu strategis dan peraturan terbaru terkait kepegawaian. Dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Oktober 2023 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perubahan regulasi tersebut mempengaruhi proses pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara. Selain itu proses administrasi kepegawaian mengalami transformasi kearah digital sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, perubahan-perubahan penting yang harus menjadi perhatian kedepannya adalah:

- a. Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip meritokrasi.

Dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian dengan prinsip meritokrasi maka perlu untuk pengembangan manajemen talenta dan karier dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Untuk itu sangat dibutuhkan Standar Kompetensi Jabatan dan dokumen rencana suksesi sebagai dasar pelaksanaan promosi dan mutasi Aparatur Sipil Negara. Proses pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta yang dapat dilakukan:

- 1) Dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
- 2) Antar Instansi Pemerintah
- 3) Keluar Instansi Pemerintah.

Presiden memiliki kewenangan untuk melaksanakan sistem mobilitas talenta secara Nasional untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional.

- b. Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan percepatan untuk pemetaan pegawai. Untuk pelaksanaan pemetaan pegawai maka perlu dilaksanakan pemenuhan indikator-indikator dalam komponen penilaian talenta.

- c. Digitalisasi layanan kepegawaian bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara.

Pada saat ini pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara digital dan terintegrasi antara Instansi Daerah dengan Badan Kepegawaian Negara. Sehingga setiap proses pelaksanaan administrasi kepegawaian lebih efektif dan efisien. Untuk mendorong pelaksanaan tersebut maka akan dilaksanakan proses integrasi antara aplikasi Sistem Layanan Kepegawaian (Silamak) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Sistem ASN digital Badan Kepegawaian Negara.

Selain itu sangat diperlukan kesadaran Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan update data kepegawaian pada aplikasi My ASN secara berkala terutama data keluarga, pengembangan kompetensi dan penghargaan yang diperoleh. Kelengkapan data tersebut akan sangat berpengaruh terhadap proses kepegawaian yang lain. Dalam mendukung digitalisasi layanan ini maka sangat diperlukan peningkatan kemampuan digital Aparatur Sipil Negara dan pemberi layanan.

Berdasarkan isu strategis tersebut, ada permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yaitu:

- a. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan penilaian kompetensi dan potensi secara berkala bagi Aparatur Sipil Negara

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara terhadap 543 orang. Penilaian kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara perlu dilaksanakan untuk seluruh Aparatur Sipil Negara dan dilaksanakan secara berkala. Penilaian kompetensi dapat dilaksanakan melalui CACT Badan Kepegawaian Negara atau lembaga yang telah terakreditasi. Jika telah diperoleh rekomendasi penerapan manajemen talenta maka tidak perlu dilaksanakan seleksi terbuka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi.

- b. Belum tersusunnya dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja serta standar kompetensi jabatan yang berpengaruh terhadap penyusunan dokumen kebutuhan anggaran dan penyusunan dokumen pengembangan kompetensi.

- c. Keterbatasan anggaran untuk Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Untuk mendukung penerapan manajemen talenta, maka perlu dilakukan penilaian kompetensi dan potensi bagi Aparatur Sipil Negara secara berkala. Untuk pelaksanaan ini perlu komitmen dari seluruh pihak berkepentingan.

- d. Masih belum maksimal pembinaan dan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara oleh atasan langsung.

Saat ini masih banyak atasan langsung yang belum melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap bawahan. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu bagi Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- e. Masih rendahnya kemampuan digital bagi Aparatur Sipil Negara
Rendahnya kemampuan digital Aparatur Sipil Negara sangat berpengaruh terhadap transformasi budaya kerja.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terutama dalam pencapaian Indeks Merit Sistem. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Kepala Daerah wajib untuk melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip meritokrasi. Indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh daerah dalam menerapkan prinsip meritokrasi telah dirumuskan kedalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2025.

Rendahnya capaian indeks merit sistem akan mempengaruhi capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029. Untuk itu perlu dilakukan strategi-strategi agar indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai. Strategi yang dilakukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2027 adalah:

- a. Menyelaraskan kebijakan kepegawaian
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan perubahan-perubahan regulasi terkait pengelolaan Sumber Daya Aparatur berdasarkan peraturan teknis yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
- b. Optimalisasi penerapan manajemen talenta sesuai dengan prinsip meritokrasi.
Pada tahun 2026 Kabupaten Tanah Datar akan melaksanakan ekspose terkait kesiapan Kabupaten Tanah Datar dalam penerapan manajemen talenta oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Diharapkan pada tahun ini Kabupaten Tanah Datar telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan manajemen talenta untuk mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara. Sehingga pengembangan karier Aparatur Sipil Negara dapat terkelola dengan baik dengan prinsip yang terbuka dan selektif. Hal ini tentu dapat mendorong pencapaian Indeks sistem merit Kabupaten Tanah Datar.
- c. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara
Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan dirumuskan kedalam dokumen *Human Capital development Plan* (HCDP) dan dokumen pengembangan kompetensi individu (*individu Development plan*). Sehingga kebutuhan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara lebih terarah dan sesuai

dengan kebutuhan organisasi. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara menjadi tantangan dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut maka Aparatur Sipil Negara di dorong untuk mengikuti pengembangan kompetensi secara non klasikal dan melalui *coaching*. Selain itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi untuk mendapatkan kemudahan/*cost sharing* dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi.

- d. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara melalui aplikasi Silamak

Proese administrasi pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara saat ini dilaksanakan secara online, mulai dari proses pengadaan sampai pemberhentian. Untuk itu daerah harus cepat mampu beradaptasi dalam perubahan tersebut. Untuk itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengembangkan aplikasi Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian untuk memberikan kemudahan dalam proses kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Sebagian besar proses administrasi kepegawaian diusulkan melalui aplikasi Silamak. Selain itu penggunaan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara tanpa harus meninggalkan tugas kedinasan dan menghindari kemungkinan terjadinya pemberian gratifikasi kepada Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2027 efektifitas penggunaan aplikasi Silamak dapat terus ditingkatkan dan dapat terintegrasi dengan aplikasi SIASN BKN.

- e. Meningkatkan kualitas data Aparatur Sipil Negara pada aplikasi SIASN

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendorong Aparatur Sipil Negara untuk melengkapi data kepegawaian pada aplikasi SIASN, yang bertujuan agar otomatisasi pensiun yang akan dilaksanakan oleh BKN mulai tahun 2026 tidak mengalami kendala.

- f. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara. Untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu melaksanakan evaluasi dan redistribusi pegawai dengan mempertimbangkan Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja sehingga, efektifitas organisasi dapat ditingkatkan.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan permasalahan, maka akan dirumuskan kedalam program dan kegiatan yang selaras dengan Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar pada Rancangan Awal RKPD Tanah Datar Tahun 2027 adalah "Perkuatan Pondasi Transformasi Sektor Unggulan Untuk Pertumbuhan ekonomi dan Pemulihan Pasca Bencana Menuju Tanah Datar Maju dan berkelanjutan. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 adalah:

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, lingkungan hidup berkelanjutan, investasi dan kemandirian nagari.
4. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah hasil pertanian untuk mendukung program prioritas nasional.
5. Peningkatan kualitas usaha mikro dan ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata
6. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan adaptif.
7. Peningkatan kualitas manajemen kebencanaan daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang ke 5 (lima) yaitu "Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan adaptif". Dalam mendukung pencapaian tersebut dirumuskan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sarana dan prasarana aparatur mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga setiap tahun harus dilaksanakan evaluasi dari sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini diharapkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif akan menunjang pencapaian target kegiatan yang direncanakan.

2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian Aparatur Sipil Negara

Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian Aparatur Sipil Negara bertujuan:

- a. Melaksanakan proses pengadaan Aparatur Sipil Negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara guna menjalankan fungsi pemerintahan pada Pemerintah Daerah dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan yang

merujuk kepada analisa jabatan dan analisa beban kerja serta peta jabatan yang telah ditetapkan.

- b. Tersedianya informasi dan data kepegawaian yang *update*.
- c. Terlaksananya proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan.

3. Kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara

Kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk:

- a. Melaksanakan proses pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan.
- b. Melaksanakan proses mutasi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan.

4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Kegiatan Mutasi dan Promosi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk:

- a. Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara berdasarkan gap kompetensi yang terdapat dalam *Human Capital Development plan* (HCDP) baik secara klasikal maupun non klasikal.
- b. Pengembangan kompetensi sesuai dengan syarat jabatan.
- c. Mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan berdasarkan kebutuhan daerah.

5. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur bertujuan untuk:

- a. Peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara.
- b. Peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara.
- c. Pemberian penghargaan bagi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Tabel 2.3 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Kabupaten Tanah Datar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia											
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kepegawaian				5.025.947.274	Kepegawaian				4.441.407.264	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata	100%	4.267.702.874	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.562.447.864	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batusangkar	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi pelaporan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	100%	14.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batusangkar	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi pelaporan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan	100%	8.713.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2 dokumen	3.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	2 dokumen	2.154.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	3 dokumen	6.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	3 dokumen	4.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batusangkar	Output: laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Batusangkar	Output: laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23 dokumen	2.059.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan	100%	4.593.194.134	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan keuangan daerah dengan ketentuan	100%	3.158.761.103	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan	32 orang	4.593.194.134	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan	27 orang	3.156.761.103	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan	2 dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan	2 dokumen	2.000.000	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	93%	11.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batusangkar	Output: Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome: Peningkatan kompetensi ditingkungan BKPSDM ASN	4 orang	11.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Fungsi	Batusangkar	Output: Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome: Peningkatan kompetensi dilingkungan BKPSDM ASN		0	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya administrasi umum sesuai ketentuan	100%	158.400.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				92.294.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Batusangkar	Output: paket Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	2.200.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Batusangkar	Output: paket Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	2.200.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batusangkar	Output: paket bahan logistik kantor disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan logistic kantor	10 paket	22.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batusangkar	Output: paket bahan logistik kantor disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan logistic kantor	10 paket	15.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	10 paket	11.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	6 paket	8.500.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	Batusangkar	Output: Jumlah bahan dokumen dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcome: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	782 dokumen	6.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan	Batusangkar	Output: Jumlah bahan dokumen dan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcome: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan		0	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Batusangkar	Output: Jumlah fasilitasi kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	12 laporan	6.600.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Batusangkar	Output: Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	12 laporan	6.594.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	000'000'011	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	000'000'09	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100%	000'000'089	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100%	000'000'06	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Batusangkar	Output: Jumlah unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	2 unit	540.000.000			Output: Jumlah unit Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	-	0	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batusangkar	Output: Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	4 unit	20.000.000	Pengadaan Mebel	Batusangkar	Output: Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	-	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	7 unit	120.000.000	Pengadaan dan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	3 unit	30.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah sesuai dengan ketentuan	100%	163.661.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.018.761	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat	1 laporan	31.364.400	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat	1 laporan	29.364.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 laporan	92.200.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 laporan	71.290.361	
	Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan kantor sesuai dengan kebutuhan	4 laporan	36.364.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	12 laporan	30.364.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan	100%	213.664.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	141.661.000	
	Sub Kegiatan Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Batusangkar	Output: kendaraan operasional lapangan dipelihara dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan operasional lapangan Perangkat Daerah	11 unit	164.200.000	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Batusangkar	Output: kendaraan operasional lapangan dipelihara dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan operasional lapangan Perangkat Daerah	7 unit	100.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Batusangkar	Output: mebel yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya mebel	1 unit	1.000.000	Pemeliharaan Mebel		Output: mebel dipelihara Outcome: Terpeliharanya mebel	-	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	20 unit	14.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	25 unit	10.000.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	34.464.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	31.661.000	
	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Cakupan manajemen ASN sesuai dengan NSPK	100%	758.244.400	Program Kepegawaian Daerah		Persentase Cakupan manajemen ASN sesuai dengan NSPK	100%	878.959.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	80%	245.120.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	80%	144.500.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	15.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	8.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhi kebutuhan ASN	1 dokumen	152.620.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhi kebutuhan ASN	1 dokumen	75.000.000	
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Batusangkar	Output: Jumlah hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	283 dokumen	7.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Batusangkar	Output: Jumlah hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	350 dokumen	3.000.000	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	1 lembaga	50.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	1 lembaga	50.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan informasi kepegawaian Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawaian yang menyediakan data kepegawaian yang update	1 dokumen	10.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan informasi kepegawaian Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawaian yang menyediakan data kepegawaian yang update	1 dokumen	5.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan kepegawaian Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawaian	1 dokumen	10.000.000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Batusangkar	Output: dokumen pengelolaan kepegawaian Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawaian	1 dokumen	3.500.000	
	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya	93	301.243.750	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya	93	136.995.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	450 dokumen	25.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	450 dokumen	16.139.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batusangkar	Output: Jumlah kenaikan pengelolaan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	700 dokumen	35.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batusangkar	Output: Jumlah kenaikan pengelolaan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	700 dokumen	20.856.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	20 dokumen	241.243.750	Pengelolaan Promosi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	6 dokumen	100.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	361.375.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	90%	559.424.400	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	120 orang	272.810.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1500 orang	460.000.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assesment center Outcome: Terkelolanya assessment center	2 dokumen	13.500.000	Pengelolaan Assesment Center	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assessment center Outcome: Terkelolanya assessment center	2 dokumen	75.764.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	60 orang	75.065.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	50 orang	23.660.000	
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	99,2%	40.066.750	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	99,2%	38.040.000	
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian evaluasi aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1 dokumen	8.000.000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian evaluasi aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1 dokumen	7.540.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	376 orang	11.500.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	150 orang	15.500.000	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Batusangkar	Output: Jumlah laporan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	5 laporan	12.650.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Batusangkar	Output: Jumlah laporan pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	6 laporan	10.200.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah Dokumen Proses izin Perceraian Pegawai yang dilayani Outcome: Terlaksananya kasus penyelesaian kasus perceraian ASN sesuai dengan ketentuan	18 dokumen	5.600.000	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah Dokumen Proses izin Perceraian Pegawai yang dilayani Outcome: Terlaksananya kasus penyelesaian kasus perceraian ASN	18 dokumen	4.800.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2027

Sasaran Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional berfokus pada:

- a. Penurunan kemiskinan.
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- c. Pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan.
- d. Memperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Menengah Nasional maka dirumuskan sasaran dan prioritas Pembangunan tahunan. Dalam merumuskan tersebut sasaran dan tema pembangunan Nasional tahun 2027, selain melihat sasaran pada Rencana Pembangunan Menengah Nasional maka perlu mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025. Saat ini tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 masih dalam proses perumusan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2026

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendukung capaian misi 4 (empat) pada RJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dengan sasaran Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk mendukung capaian RPJMD tersebut maka dirumuskan tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu: Terwujudnya regulasi dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan adaptif berdasarkan prinsip meritokrasi

Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2026 serta merujuk RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dirumuskan tujuan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan diatas, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar menetapkan sasaran yang ditetapkan secara berkesinambungan.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target 2027
Terwujudnya regulasi dan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara yang berintegritas dan adaptif berdasarkan prinsip meritokrasi	Meningkatnya penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,65
	Meningkatnya Pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen Aparatur Sipil Negara	97,20
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	76,8

Dalam menetapkan target indikator kinerja Indeks Sistem Merit, terjadi perubahan target kinerja yang pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan target baik, sedangkan pada Renja Tahun 2027 ditetapkan target 0,65. Perubahan target ini merujuk kepada perubahan prediket dan nilai Indeks Sistem Merit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Perumusan sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaras dengan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027.

Tabel 3.2

Persandingan Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Sasaran Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027

Sasaran RKPD	Indikator	Target 2027	Sasaran Renja BKPSDM	Indikator	Target 2027
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	87	Meningkatnya penerapan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,65
			Meningkatnya Pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen Aparatur Sipil Negara	97,20
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	76,8

Tabel 3.3
Target Capaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Indeks Sistem Merit	-		Baik
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan manajemen ASN	-		97,20
3	Nilai SAKIP	-		76,8
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	80
4			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	96,00
5			Persentase Pengembangan karir sesuai dengan kompetensinya	93,00
6			Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	99,20
7			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	80,8
8			Rasio Pegawai Fungsional (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	26,9
9			Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40,05

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan, maka dirumuskan kedalam program/kegiatan/sub kegiatan, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar melaksanakan inovasi berupa pengembangan Aplikasi Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepegawaian. Saat ini aplikasi Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian telah bisa dimanfaatkan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam beberapa layanan yaitu:

1. Layanan update database Pegawai Negeri Sipil
2. Layanan pengusulan pensiun
3. Layanan proses penerbitan izin belajar Pegawai Negeri Sipil
Layanan ini memudahkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengusulkan penerbitan izin belajar, sehingga Pegawai Negeri Sipil tidak perlu lagi menyerahkan kelengkapan bahan ke Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Layanan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
5. Layanan pengusulan satya lancana karya satya
6. Layanan pengusulan Kartu Suami/Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil
7. Layanan pengajuan usulan pelatihan
8. Layanan pengusulan pencantuman gelar
9. Layanan pengusulan Masa Persiapan Pensiun
10. Layanan pengurusan Cuti
11. Layanan pengurusan Kenaikan Gaji Berkala
12. *Coaching*

Untuk tahun 2027 diharapkan seluruh manajemen kepegawaian telah menggunakan aplikasi Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian dan aplikasi Srikandi secara optimal, sehingga untuk kedepannya seluruh pelayanan kepegawaian dapat dilaksanakan secara *online* dan *lesspaper*.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Kepegawaian
 - a. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
 - b. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan ASN
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN
 - c. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- d. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Alokasi anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun anggaran 2027 sebesar Rp7.017.313.134,00 (tujuh milyar tujuh belas juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tiga puluh empat rupiah), dengan rincian Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 serta Perkiraan Maju Tahun 2028.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2027

Berdasarkan analisa capaian kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis di bidang pengelolaan sumber daya Aparatur Sipil Negara, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kabupaten Tanah Datar khususnya, maka dirumuskan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang jelas dan dapat dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027 dan Perkiraan Maju Tahun 2028 Kabupaten Tanah Datar
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar 1 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
5.03	<i>Kepegawaian</i>				4.441.407.264			
5.03.01	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	Cakupan Administrasi perkantoran yang ditata		100%	3.562.447.864			
5.03.01.2.001	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan			8.713.000			
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Batusangkar	2 dokumen	2.154.000	APBD		2 dokumen
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Batusangkar	3 dokumen	4.500.000	APBD		3 dokumen
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Batusangkar	23 dokumen	2.059.000	APBD		23 dokumen
								4.500.000

Lembar 2 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Outcome: Meningkatkan kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3.158.761.103				5.052.613.547
5.03.01.2.02.0001	Administrasi Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	Batusangkar	27 orang	3.156.761.103	APBD		32 orang	5.052.613.547
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	Batusangkar	2 dokumen	2.000.000	APBD		2 dokumen	6.500.000
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Batusangkar	90%	0			93%	11.000.000
5.03.01.2.05.0002	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tugas Berdasarkan Fungsi	Output: Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Outcome: Peningkatan kompetensi ASN dilingkungan BKPSDM	Batusangkar	0 orang	0	APBD		5 orang	11.000.000

Lembar 3 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Rencana Kerja Tahun 2028		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi umum sesuai ketentuan		100%	92.294.000			100%	172.800.000
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Outcome: Terpenuhi kebutuhan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Output: Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Batusangkar	2 paket	2.200.000	APBD		4 paket	2.400.000
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhi kebutuhan logistik kantor	Batusangkar	12 paket	15.000.000	APBD		10 paket	24.000.000
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	6 paket	8.500.000	APBD		10 paket	11.000.000
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan bahan dan perundang-undangan	Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcome: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Batusangkar	-	0			-	-
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output: Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu	Batusangkar	12 laporan	6.594.000	APBD		12 laporan	7.200.000

Lembar 4 dari 10

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Batusangkar	40 laporan	60.000.000	APBD		40 laporan	120.000.000
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan		100%	30.000.000			100%	680.000.000
5.03.01.2.07.0001	Jumlah Kendaran Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Output: Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM		4 unit	0			1 unit	40.000.000
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Output: Jumlah Pengadaan Mebel yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	Batusangkar	3 unit	0	APBD		3 unit	15.000.000
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	Batusangkar	7 unit	30.000.000	APBD		4 unit	62.000.000

Lembar 5 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan		100%	137.018.761			100%	213.664.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat	Batusangkar	1 laporan	29.364.400	APBD		1 laporan	31.964.400
5.03.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Batusangkar	12 laporan	71.290.361	APBD		12 laporan	94.200.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	Batusangkar	4 laporan	36.364.000	APBD		12 laporan	37.964.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan		100%	141.661.000			100%	231.464.000

Lembar 6 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Penerimaan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
5.03.01.2.09.02	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Perangkat Daerah	Batusangkar	7 unit	100.000.000	APBD		12 unit	178.900.000
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Output: Jumlah mebel yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya mebel	Batusangkar	2 unit	0	APBD		1 unit	1.000.000
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Batusangkar	20 unit	10.000.000	APBD		20 unit	16.000.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Batusangkar	2 unit	31.661.000	APBD		2 unit	35.564.000
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Cakupan manajemen ASN sesuai dengan NSPK		100%	878.959.400			100%	947.805.500
5.03.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi		80%	144.500.000			80%	377.500.000

Lembar 7 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.02.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Output: Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Batusangkar	1 dokumen	8.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
5.03.02.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhi kebutuhan ASN	Batusangkar	1 dokumen	75.000.000	APBD		1 dokumen	285.000.000
5.03.02.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Output: Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	Batusangkar	350 dokumen	3.000.000	APBD		350 dokumen	7.500.000
5.03.02.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	Batusangkar	1 lembaga	50.000.000	APBD		1 lembaga	50.000.000
5.03.02.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Batusangkar	1 dokumen	5.000.000	APBD		1 dokumen	10.000.000

Lembar 8 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.02.01.11	Pengelolaan Kepegawaian	Data	Batusangkar	100 dokumen	3.500.000	APBD		100 dokumen	10.000.000
5.03.02.02	Mutasi dan Promosi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawaian Persentase pengembangan karir ASN sesuai kompetensinya		93	136.995.000			93,5	437.000.000
5.03.02.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karir PNS	Batusangkar	500 dokumen	16.139.000	APBD		450 dokumen	35.000.000
5.03.02.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Output: Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karir PNS	Batusangkar	700 dokumen	20.856.000	APBD		700 dokumen	52.000.000
5.03.02.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karir PNS	Batusangkar	16 dokumen	100.000.000	APBD		25 dokumen	350.000.000

Lembar 9 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Penerimaan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5.03.02.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya		96	559.424.400			96,5	949.937.500
5.03.02.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	500 orang	460.000.000	APBD		334 orang	570.212.500
5.03.02.03.02	Pengelolaan Assesment Center	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assesment center Outcome: Terkelolanya assesment center	Batusangkar	2 dokumen	75.764.400	APBD		3 dokumen	199.725.000
5.03.02.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	50 orang	23.660.000	APBD		70 orang	180.000.000
5.03.02.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik		99,2%	38.040.000			99,3	83.500.000
5.03.02.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	1 dokumen	7.540.000	APBD		1 dokumen	10.000.000
5.03.02.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	Batusangkar	200 orang	15.500.000	APBD		387 orang	23.500.000

Lembar 10 dari 10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Rencana Kerja Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pengu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pengu Indikatif
5.03.02.04.08	Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	Batusangkar	6 laporan	10.200.000	APBD		5 laporan	30.000.000
5.03.02.04.09	Sub Kegiatan Pelayanan Izin Pegawai	Output: Jumlah Dokumen Proses izin Perencanaan Pegawai yang dilayani Outcome: Terlaksananya penyelesaian kasus perencanaan ASN sesuai dengan ketentuan	Batusangkar	18 dokumen	4.800.000	APBD		334 orang	570.212.500

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2027 yang dilaksanakan simultan dan terkoordinasi dengan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 dan Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan manajemen kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara perlu merumuskan kebijakan yang dapat mendukung tercapainya peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan terlaksananya manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip meritokrasi. Dalam penerapan sistem meritokrasi maka perlu dilaksanakan penyusunan dokumen manajemen talenta secara bertahap.

Selain itu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka selalu dikembangkan pelayanan kepegawaian secara digitalisasi. Digitalisasi layanan berupa penggunaan aplikasi Sistem Layanan Manajemen Kepegawaian (Silamak) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh layanan.

Dokumen Renja Tahun 2027 memuat rancangan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2027 yang selaras dengan Kementerian/lembaga yang menjadi *stakeholder* Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu juga mencapai sasaran strategis yang disusun dengan mempertimbangan pendanaannya serta prakiraan maju kerangka pendanaannya dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan disusunnya dokumen Renja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2027, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan antar sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi lain.

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA